



SALINAN

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019

TENTANG

**HASIL ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 telah ditetapkan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun kebutuhan jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Beban Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Surat Menteri PANRB Nomor B/846/SM.01.00/2019 tanggal 26 Juli 2019 Hal Pembaharuan Data E-Formasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HASIL ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan:

- a. Hasil Analisis Beban Kerja Per Jabatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. Hasil Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum pada Lampiran II;

- c. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- e. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- f. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- g. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- h. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Bahan Beracun Berbahaya sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Hasil Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Hasil Analisis Beban Kerja Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
- m. Hasil Analisis Beban Kerja Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII;
- n. Hasil Analisis Beban Kerja Badan Penelitian, Penembangan, Dan Inovasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, menjadi acuan dalam pengadaan pegawai, *inpassing* fungsional, jenjang karier fungsional dan penataan pegawai.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN KUSNANDAR

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

	1	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0	1	-1
	2	Analisis Barang Milik Negara	0	1	-1
	3	Analisis Keuangan	0	1	-1
	4	Bendahara	1	1	0
	5	Pengolah Data	0	1	-1
	6	Sekretaris	0	1	-1
	7	Verifikator Keuangan	1	1	0
	8	Pengelola Keuangan	0	1	-1
	9	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
	10	Pengelola Keuangan	0	1	-1
	11	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
	12	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
	13	Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	-1
	14	Arsiparis Pelaksana/Terampil	0	2	-2
	15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	0	1	-1
	16	Pengemudi	0	1	-1
II	Bidang Renbang dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur LHK		4	16	-12
A	Subbidang Renbang Sumber Daya Manusia Non Aparatur LHK		2	10	-8
	1	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	2	4	-2
	2	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	0	4	-4
	3	Pengolah Data	0	1	-1
	4	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
B	Subbidang Evlap Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur LHK		2	6	-4
	1	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	4	-3
	2	Pengolah Data	1	1	0
	3	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
III	Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia LHK		6	19	-13
A	Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia LHK		2	7	-5
	1	Analisis Kompetensi	2	4	-2
	2	Pengolah Data	0	2	-2
	3	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
B	Subbidang Pengujian Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia LH		4	12	-8
	1	Analisis Kompetensi	2	4	-2
	2	Pengolah Data	0	2	-2
	3	Pengadministrasi Umum	0	2	-2
	4	Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi	0	1	-1
	5	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	1	1	0
	6	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	1	2	-1
IV	Jabatan Fungsional		2	1	-24
	1	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	1	-1
Jumlah Pelaksana dan Fungsional			18	68	-49

4. Pusat Diklat Sumber Daya Manusia LHK

No	Nama Jabatan	B	ABK	+/-
I	Bagian Program dan Umum	43	84	-41
A	Subbagian Program	2	5	-3
	1 Analisis Rencana Program dan Kegiatan	2	2	0
	2 Pengolah Data	0	1	-1
	3 Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	2	-2
B	Subbagian Kepegawaian	5	7	-2
	1 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3	2	1
	2 Pengelola Kepegawaian	0	1	-1
	3 Pengolah Data	1	1	0
	4 Pengolah Data	1	1	0
	5 Analisis Kepegawaian Muda	0	1	-1
	6 Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	-1
C	Subbagian Umum	36	72	-36
	1 Analisis Barang Milik Negara	1	2	-1
	2 Analisis Keuangan	4	4	0
	3 Bendahara	1	1	0
	4 Komandan Petugas Keamanan	1	1	0

	5	Pengadministrasi Umum	5	5	0
	6	Pengelola Barang Persediaan	1	1	0
	7	Pengelola Gaji	1	1	0
	8	Pengelola Keuangan	0	2	-2
	9	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	2	-1
	10	Pengolah Data	1	3	-2
	11	Pengemudi	2	6	-4
	12	Petugas Keamanan	2	6	-4
	13	Pramu Bakti	13	27	-14
	14	Sekretaris	1	1	0
	15	Verifikator Keuangan	1	2	-1
	16	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
	17	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	0	1	-1
	18	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	1	2	-1
	19	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1	-1
	20	Arsiparis Pertama	0	1	-1
	21	Pustakawan Pelaksana/Terampil	0	2	-2
II	Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan E-Learning		12	16	-4
	A	Subbidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	7	9	-2
	1	Analisis Program Diklat	3	3	0
	2	Pengolah Data	3	2	1
	3	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	4	Pranata Komputer Pertama	0	2	-2
	5	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	1	-1
	B	Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerjasama	5	7	-2
	1	Analisis Data dan Kerjasama Diklat	4	3	1
	2	Pengolah Data	1	2	-1
	3	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
	4	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	1	-1
III	Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis		8	11	-3
	A	Subbidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	4	5	-1
	1	Analisis Diklat	2	2	0
	2	Pengolah Data	1	2	-1
	3	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	B	Subbidang Diklat Teknis	4	6	-2
	1	Analisis Diklat	2	2	0
	2	Pengolah Data	2	2	0
	3	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
	4	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	1	-1
IV	Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi		7	12	-5
	A	Subbidang Diklat Administrasi	4	6	-2
	1	Analisis Diklat	1	2	-1
	2	Pengolah Data	2	3	-1
	3	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	B	Subbidang Diklat Kepemimpinan	3	6	-3
	1	Analisis Diklat	1	2	-1
	2	Pengolah Data	1	2	-1
	3	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	4	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	1	-1
V	Jabatan Fungsional		35	38	-3
	1	Widyaiswara Pertama	1	3	-2
	2	Widyaiswara Muda	5	4	1
	3	Widyaiswara Madya	15	15	0
	4	Widyaiswara Utama	14	16	-2
Jumlah Pelaksana dan Fungsional			105	161	-56

5. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

No	Nama Jabatan	B	ABK	+/-
I	Bagian Program dan Umum	5	26	-21
	A Subbagian Program	1	4	-3
	1 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0